

BAB. VI PERMASALAHAN

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur terdapat kendala kendala yang sering kali menghambat kegiatan pembangunan perkebunan baik dari lapangan maupun dari administrasi.

A. Permasalahan

Kegiatan Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat

1. Kemampuan teknis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit sehingga budidaya kelapa sawit masih belum dikenal masyarakat secara luas.
2. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru dilakukan oleh Petugas Dinas Perkebunan Kabupaten dan Petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan – lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan berada di luar kawasan budidaya kehutanan (KBK).
3. Pelaksanaan bantuan petani berupa kontraktual / Pihak ketiga sehingga untuk penyaluran bantuan tersebut harus menunggu setelah pengumuman dari pemenang lelang dan proses pengadaan kontraktual.
4. Adanya serangan ringan hama landak dan babi yang lokasi – lokasi yang dekat dengan hutan, namun oleh kelompok tani mengatasi dengan memberikan racun – racun dan pemasangan jaring penangkar.
5. Para petugas lapangan (PPL) dalam pembinaan dan pendampingan petani dilapangan masih kurang intensif terutama dalam mensosialisasikan kegiatan PIR dan tahapan kegiatan di lapangan hal ini disebabkan oleh kemampuan PPL akan pelayanan ke petani, lahan yang jauh – jauh sedangkan sarana transport sepeda motor dan biaya operasional lapangan kurang tersedia.

Kegiatan Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah

Dalam kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi alsin budidaya untuk pemanfaatan Alat dan Mesin Perkebunan yang diserahkan ke kelompok tani masih belum optimal dan dilapangan masih dijumpai peralatan pasca panen dan pengolahan hasil yang belum dioperasikan dengan baik karena;

- Petani perkebunan masih banyak yang belum menggunakan alat budidaya yang belum sesuai dengan standar teknis
- Mangkok panen karet tidak menggunakan mangkok standar ketentuan
- Banyak petani umumnya petani kakao melakukan pemangkasan tidak menggunakan gunting pangkas

Kegiatan Revitalisasi Perkebunan

1. Kurangnya pemahaman terhadap program revitalisasi perkebunan khususnya stakeholder di kab/kota dan proses persyaratan administrasi (calon plasma, calon lahan dan calon perusahaan mitra) oleh pemerintah kabupaten terhambat.
2. Sulitnya petani untuk memenuhi persyaratan perbankan khususnya pada pola non kemitraan.

3. Tingginya biaya sertifikasi lahan dan terbatasnya tenaga untuk proses sertifikasi.
4. Infrastruktur yang kurang mendukung.
5. Kurangnya tenaga kontrak pendamping (TKP) dan masih rendahnya kemampuan Tenaga Kontrak Pendamping tersebut.
6. Masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban membangun kebun plasma 20% (Permentan 26 Tahun 2007 Pasal 11) untuk dijadikan kebun kemitraan dengan masyarakat sekitar karena tidak ada sanksi
7. Masalah sengketa lahan desa yang belum selesai sehingga dalam penyusunan SK CP /CL oleh Pemerintah Kabupaten
8. Lemahnya kelembagaan petani terhadap pengelolaan kebun kemitraan
9. Batas desa di beberapa tempat masih belum definitif
10. Ruang (lahan) yang terbatas untuk pembangunan kebun kemitraan di wilayah-wilayah tertentu
11. Pembagian wilayah, penetapan kewajiban bagi perusahaan pada koperasi, desa hingga KK yang dibina
12. Peningkatan SDM Koperasi/Petani
13. Tuntutan ganti rugi/tali asih lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan
14. Keterbatasan kemampuan tenaga lapangan/petugas pendamping revitalisasi perkebunan yang berfungsi mengawal jalannya pelaksanaan program revitalisasi
15. Belum adanya petunjuk pembentukan tim independen yang akan melakukan verifikasi terhadap besaran nilai kredit kebun revitalisasi

Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

1. Letak geografis wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas, sementara SDM petugas pengawas benih tanaman masih terbatas, sehingga pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan belum maksimal
2. Masih ditemukan peredaran benih kelapa sawit illegitim dengan pelaku berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur.
3. Beberapa komoditi perkebunan unggul lokal seperti lada, kelapa, dll belum ditetapkan sebagai blok penghasil tinggi atau pohon induk atau sumber benih, sehingga agak menyulitkan proses sertifikasi benih mengingat benih/bibit yang digunakan sebagai bahan tanam harus benih bina.
4. Standar baku operasional prosedur SNI untuk masing-masing benih tanaman perkebunan belum semua ada, sementara SNI yang ada baru sebagian saja sehingga agak menghambat pelaksanaan kegiatan dilapangan
5. Belum ada aturan standar baku blanko/form pengawasan peredaran benih sebagaimana dalam Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 Pasal 50 dan Pasal 51 seperti penghentian sementara, pemeriksaan kebenaran dokumen atau larangan peredaran benih.
6. Diperlukan penyegaran kepada petugas Pengawas Benih Tanaman dan PPNS guna meningkatkan kinerja serta agar dapat diikutsertakan dalam bentuk pelatihan lanjutan baik itu magang ke sumber benih maupun pelatihan teknis yang diadakan oleh Dirjenbun atau BP2TP Medan.
7. Kekurangan SDM yaitu pada staf Subbag Tata Usaha 1 (satu) orang, tenaga analis laboratorium 1 (satu) orang, staf Seksi Pengujian dan Sertifikasi 1 (satu) orang dan sopir 1 (satu) orang pada UPTD-PBP
8. Belum semua Perkebunan Besar Swasta melakukan sertifikasi benih untuk kebun-kebun plasma sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525.26/7972/PB Tanggal 12 September 2011

9. Kegiatan pengawasan peredaran benih perkebunan di daerah belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran oleh dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota berupa dana operasional lapangan bagi Pengawas Benih Perkebunan.
10. Belum dimanfaatkannya kebun-kebun entres karet yang ada di Kalimantan Timur sebagai sumber benih baik berupa OMT maupun bibit siap salur, sehingga masyarakat atau pengguna benih masih mendatangkan OMT atau bibit dari luar provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan kurang informasi, harga lebih mahal, ketersediaan jumlah bibit tidak yang mencukupi, waktu pemesanan, SDM pengelola kebun entres belum profesional, dll.
11. Anggaran untuk kegiatan pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan pada tahun 2013 masih kurang.

Kegiatan Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebunan

1. Kurangnya Pemanfaatan agens Pengendali Hayati oleh petani;
2. Kontinuitas Penyampaian laporan perkembangan OPT dari Kab / Kota sering terlambat;
3. Ketersediaan SDM di Bidang Teknis Pengendalian OPT dirasakan masih kurang serta masih belum optimalnya kinerja dari petugas;
4. Luasnya cakupan wilayah kegiatan sehingga tidak semua lokasi sebaran sentra-sentra produksi perkebunan terutama perkebunan rakyat di Kalimantan Timur dapat terjangkau dan teridentifikasi penyebaran hama, penyakit dan gulmanya;
5. Keterbatasan infrastruktur terutama akses jalan menuju ke lokasi kebun sangat menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT;